

HUBUNGAN PROSES POLITIK DAN KONSEKUENSI EKONOMI MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN STANDAR AKUNTANSI OLEH FASB

Nada Melinda

Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu

nadamelinda26@gmail.com

Received: 31-01-2024

Revised: 02-02-2024

Approved: 20-02-2024

RINGKASAN

Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang kaitan esensi politik dalam pengaturan pembentukan standar akuntansi yang dilakukan melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan AS (FASB). Proses penyusunan standar sebagai proses politik karena aspek politik dalam akuntansi seperti halnya ada aspek politik secara fisik. Hal ini membutuhkan kehati-hatian terkait apakah politik berperan atau tidak dalam penetapan standar akuntansi. Oleh karena itu, di masa mendatang FASB harus memperhatikan isu ini demi menjaga kredibilitas akuntansi itu sendiri. Pertimbangan politik memberi pengaruh terhadap formulasi standar akuntansi dan keputusan ekonomi individu yang pada akhirnya memberikan juga dampak pada tujuan ekonomi secara makro. Dalam hal ini politik memang secara jelas mengambil peran yang signifikan dalam proses penentuan standar akuntansi.

Kata Kunci : Politik; Standar Akuntansi ; FASB

1. PENDAHULUAN

Perkembangan standar akuntansi telah mengalami peningkatan yang sangat cepat. Dalam mardiyah, 2002:97 Standar yang dibentuk berfungsi sebagai *disclosure, uniformity, regulation, and measurement*. (Purba, Rahmania, & Utami, 2018). Dengan kata lain standar dibentuk untuk pengungkapan rahasia, membuat keseragaman, sebagai aturan dan pengukuran. Standar dibentuk dengan tujuan mengurangi moral hazard (manajemen berusaha untuk *overstated* dan *understated*) walaupun pada akhirnya akan tetap dan sellau ada moral hazzard yang lain yaitu proses politik. Standar dibentuk dengan proses politik yang berpengaruh pada aspek speerti pemerintah, sektor publik maupun sektor privat. Menurut (Vinet & Zhedanov, 2011), standar akuntansi sebagai acuan dalam mengambil tindakan akuntansi terhadap sebuah kejadian. Acuan tersebut bisa dalam bentuk pengartian atau pendefinisian, pengukuran, pengakuan, penilaian, dan pengungkapannya dalam praktik akuntansi. Praktik akuntansi ini dikembangkan dan dijalankan secara sengaja untuk mencapai tujuan sosial tertentu.

Informasi akuntansi merupakan media komunikasi pihak-pihak yang berkepentingan melalui laporan keuangan perusahaan yang berisi kegiatan usaha perusahaan dengan atas posisi keuangan dan perkembangan usaha perusahaan (Salmiah, Indarti, & Siregar, 2015). Menurut Hall (2001:18) ada tiga tujuan utama bagi sistem informasi akuntansi, yaitu :

- 1) Untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen. Kepengurusan merujuk ke tanggung jawab manajemen untuk mengatur sumber daya perusahaan secara benar.

Sistem informasi menyediakan informasi tentang kegunaan sumber ke para pemakai informasi melalui laporan keuangan yang dibutuhkan.

- 2) Untuk mengambil keputusan manajemen. Sistem informasi akuntansi ini akan memberikan informasi kepada para manajer yang mereka perlukan untuk melakukan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan tersebut.
- 3) Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari. Sistem informasi menyediakan informasi bagi personil operasi untuk membantu mereka melakukan tugas mereka setiap hari secara efisien dan efektif.

Seluruh negara dunia mengungkapkan bahwa banyak variasi atau ragam dalam pengaturan/regulasi, penegakan, dan kegiatan kegiatan politik dan ekonomi untuk mengidentifikasi adakah hubungan diantara keduanya. Memahami hubungan antara teori regulasi politik dan ekonomi dalam penetapan standar akuntansi akan memudahkan dalam memahami teori tentang regulasi itu nantinya. Hal ini sangatlah berpengaruh bagi negara-negara yang menerapkan sistem pasar bebas salah satu contohnya seperti Negara Amerika Serikat. Menurut Zeff (1972) Masyarakat Amerika pada tahun 1970an menyoroti aspek aspek sosial, lingkungan dan konsekuensi ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk opini publik untuk menyusun standar akuntansi melalui institusi. (Purba et al., 2018).

Pada mulanya akuntansi dianggap sebagai subjek yang tidak ada kaitannya dengan politik. Keterlibatan politik lebih banyak di bidang matematik atau astronomi, psikologi, survai, tehnologi komputer, atau statistik (Solomons, 1978). Perkembangan selanjutnya, pada saat penetapan standar akuntansi dianggap mempengaruhi perilaku ekonomi. Dengan demikian akuntansi dapat mempengaruhi perilaku manusia dan proses yang disebut dengan proses politik (Solomons, 1978). Ini berarti pada saat itu akuntansi dipandang sebagai sebuah subjek yang hanya berkaitan dengan pembukuan dan keuangan. (Mardiyah, 2002).

Gerboth (1973) menyatakan “bila proses pengambilan keputusan tergantung kepada kesuksesan untuk meyakinkan publik, isu tersebut tidak bersifat tehnikal lagi; tetapi bersifat politikal.” Hal ini mengartikan jika ada dan terjadi konflik kepentingan maka membutuhkan kompromi. Kompromi yang dimaksudkan ini termasuk salah satu esensi politik. Penetapan standar akuntansi merupakan produk politik baik secara logika maupun secara empiris menurut Horngren (1973). Pendapat ini juga didukung oleh pernyataan May dan Sundem (1976) bahwa dalam praktek maupun teori, laporan akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan pada kesejahteraan sosial. Berdasarkan Watts (1977) dan Watts and Zimmerman (1978), telah mengembangkan teori-teori berbasis ekonomi dari pengaturan standar yang menggunakan kekuatan politik sebagai intervensi yang disengaja dalam proses penetapan standar oleh entitas ekonomi. Hal ini bertujuan memengaruhi hasil proses dalam rangka meningkatkan kekayaan ekonomi perusahaan dan bahkan untuk mencapai tujuan pribadi. (Purba et al., 2018)

Beberapa pendapat para ahli yang mengungkap tentang kaitan akuntansi dengan proses politik ini memyatakan secara tidak langsung jika politik dalam akuntansi menjadi erat kaitannya. Sehingga tidak heran jika FASB disebut sebagai sebuah badan politik. Hal ini dikarenakan proses seleksi alternatif akuntansi yang dilakukan didalamnya merupakan proses politik dimana harus mempertimbangkan aspek politik seperti kesejahteraan sosial, keputusan teori akuntansi dan riset akuntansi.

Artikel ini bertujuan untuk melakukan pembahasan pada proses penetapan standar. Artikel ini akan membahas tentang adanya esensi politik dalam proses penetapan standar. Hal ini juga menjelaskan bahwa pengaturan standar sebenarnya terbatas pada keputusan FASB, namun karena terdapat sebagian pihak yang melakukan *lobbying* atau kompromi dalam proses penetapan standar, maka FASB memutuskan untuk menambahkan proyek ke dalam agendanya.

LITERATUR REVIEW

Teori Ekonomi- Politik

Penempatan akuntansi sebagai sains menjadikan teori akuntansi bersifat deskriptif. Hal ini dibuktikan dari banyaknya penelitian-penelitian tentang akuntansi yang tidak berkaitan secara langsung dengan standar akuntansi yang ada pada umumnya (Vinet & Zhedanov, 2011). Menurut Deliarnov (2006:8) ekonomi politik merupakan bidang studi yang mempelajari tentang teori sosial dan keterbelakangan serta menguraikan tentang ekonomi politik yang berfokus pada masalah dasar dalam teori sosial dan hubungan antara politik dan ekonomi. Isu ini memunculkan pernyataan mengenai bagaimana kedua proses tersebut saling berkaitan dan bagaimana seharusnya mereka terkait. Pada awalnya ekonomi politik bertujuan dalam memberi masukan tentang pengelolaan dan penyelesaian masalah ekonomi kepada penyelenggara negara atau pemerintah. Para pakar ekonomi politik memberikan arti baru tentang ekonomi politik sebagai analisis ekonomi terhadap proses politik. Hal ini dikarenakan para pakar tersebut menyimpulkan institusi politik sebagai keberadaan yang berhubungan langsung dengan keputusan ekonomi politik. Artinya, institusi politik disini memiliki peran yang cukup signifikan dalam pengambilan keputusan dan pilihan publik juga kepentingan kelompoknya atau masyarakat. (Purba et al., 2018)

Ekonomi politik lahir dari hasil usaha yang telah dilakukan dalam menghasilkan sinergi, mengisi kekosongan yang tidak dijumpai dalam satu disiplin atau disiplin politik saja. Kebutuhan akan penggabungan antara ekonomi dan politik memang dirasakan setiap warga negara. Jika membahas tentang ilmu ekonomi atau ilmu politik secara terpisah, maka akan mengalami kesulitan dalam memahami secara rinci gejala dan masalah yang dihadapi secara nyata dalam interaksinya. (Menurut Arifin, Bustanul dan Didik J. Rachbini, 2001).

Pembahasan tentang ekonomi politik dimulai dari penelitian mengenai sistem politik dan kinerja ekonomi namun hasil penelitian tetap susah dalam menyatukan kesimpulan dan hubungan antar keduanya. Maka terjadilah pergeseran untuk melakukan riset dalam menilai hubungan stabilitas politik dengan pencapaian ekonomi. Yustika (2013:100) menjelaskan bahwa stabilitas politik dengan pencapaian ekonomi sangatlah erat hubungannya karena jika stabilitas politik baik akan meningkatkan pencapaian ekonomi begitupun jika terjadi instabilitas politik maka pencapaian ekonomi pun mengalami penurunan. Pendekatan ekonomi politik melibatkan semua pihak penyelenggara politik, baik aspek, proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang harus dan dilakukan oleh masyarakat maupun yang sesuai dengan arahan pemerintah. Pendekatan ini meletakkan bidang politik subordinat terhadap ekonomi, mekanisme pasar, harga, dan investasi dianalisis dengan menggunakan *setting* sistem politik dimana peristiwa ekonomi terjadi. Hal ini dikarenakan melihat ekonomi sebagai cara untuk

melakukan tindakan (*a way of acting*), dan politik sebagai awadah penyedia dalam mendukung tindakan itu. Pendekatan ekonomi politik tidaklah berupaya untuk menggabungkan antara keduanya namun untuk mengkaji hubungannya antar satu sama lain agar memperlihatkan kenyataan yang ada di lapangan.

“Ilmu ekonomi dan ilmu politik memang berlainan, dimana keduanya mempunyai alat analisis yang berbeda dan bahkan asumsi yang bellawanan. Tentunya tidak mungkin untuk menggabungkan alat analisis ekonomi dan politik “ (Caporaso J.A., Levine D.P, 1992) Melalui hal inilah, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hala alokasi sumber daya ekonomi, pendekatan ekonomi politik mempertemukan antara bidang ekonomi dan politik. Bentuk praktik dan pelaksanaan kebijakan ekonomi politik selalu memikirkan struktur kekuasaan dan aspek sosial (masyarakat) yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

Standar Akuntansi

Syarat utama Informasi akuntansi dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan baik kernal dan internal maka penyusunannya haruslah sesuai Standar Akuntansi Keuangan. Informasi biasa didapat dari pihak manapun tanpa memandang apakah entitas itu kecil ataupun besar. Informasi dari perusahaan kecil bahkan sangat bermanfaat untuk menelaah asal mula sebuah perusahaan besar bertumbuh karena dapat melihat struktur modalnya dan progres keuntungan yang selalu didapat (Eka Widiastuti, 2012). Holmes dan Nicholls (1989) dalam Harahap (2007) menyatakan bahwa informasi akuntansi yang banyak disiapkan dan digunakan perusahaan kecil dan menengah adalah informasi yang diharuskan menurut undang-undang atau peraturan (*statutory*). Informasi akuntansi yang seharusnya dibutuhkan oleh manajemen perusahaan kecil dan menengah masih sangat minim disebabkan oleh lemahnya praktik akuntansi pada perusahaan kecil. Kelemahan tersebut karena rendahnya pendidikan dan penggunaan standar akuntansi yang dijadikan pedoman dalam penyusunan nya.

Standar akuntansi merupakan adalah suatu cara dan format baku dalam penyediaan informasi laporan keuangan suatu kegiatan usaha. Standar akuntansi dibuat, disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (*Standard Setting Body*). Didalam standar akuntansi terdapat penjelasan mengenai transaksi-transaksi yang harus dilakukan pencatatan dan cara pencatatannya serta penyajian laporan nya. Banyak akuntan dan para pengguna laporan atau pemangku kepentingan menganggap standar akuntansi sbegia permasalahan utama. Metode atau cara dan format/bentuk penyusunan standar akuntansi harus diatur secara lengkap agar dapat memberikan kepuasan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi dapat berubah dan dikembangkan sesuai tuntutan di masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi menyajikan informasi di seluruh dunia. Keadaan ini merupakan jalan keluar bagi para investor untuk memasuki pasar modal di seluruh dunia, yang tidak terhalangi oleh batasan negara, misalnya: Investor dari Belanda bisa dengan mudah berinvestasi di Jepang, Amerika, Singapore, atau bahkan Indonesia. Namun, Kebutuhan ini akan mengalami kendala jika perusahaan-perusahaan masih memakai prinsip pelaporan keuangan yang berbeda-beda. Amerika memakai FASB dan US GAAP, Indonesia memakai PSAK-nya IAI, uni eropa memakai IAS dan IASB. Sehingga hal ini

melatarbelakangi perlunya adopsi IFRS saat ini (Gamayuni, 2009). *International Financial Reporting Standards (IFRS)* dijadikan sebagai referensi atau panduan utama pengembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Hal ini dikarenakan IFRS merupakan standar yang sangat kokoh. IFRS Sebelumnya dikenal *International Accounting Standards (IAS)* antara tahun 1973 dan 2001 oleh *Board of the International Accounting Standards Committee (IASC)*. Mengadopsi IFRS berarti mengadopsi atau menggunakan bahasa pelaporan keuangan global yang akan memudahkan pasar global memahami informasi didalamnya. Mengadopsi IFRS juga bukan berarti hanya mengganti angka-angka di laporan keuangan, tetapi mengubah pola pikir dan cara semua elemen di dalam perusahaan. Penerapan standar akuntansi yang sama di seluruh dunia akan mengurangi masalah-masalah terkait daya banding dalam pelaporan keuangan.(Prasetya, 2012).

Menurut FASB, standar akuntansi metode yang seragam dalam penyajian informasi agar laporan keuangan dari setiap perusahaan dapat lebih mudah dibandingkan melalui konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan dan praktik yang dipilih dan dianggap dapat diterima secara umum. Standar *Setting* Proses pembentukan standar akuntansi atau sering disebut standar *setting process* merupakan proses yang cukup pelik karena melibatkan aspek politik, bisnis, sosial dan budaya. Aspek politik dapat dikatakan memiliki pengaruh yang dominan karena terdapat tarikan kepentingan baik dari pihak pemerintah, swasta dan bahkan para akuntan. Hal ini disebabkan standar-standar akuntansi yang akan diberlakukan dan dijadikan pedoman tentunya akan mengikat semua pihak.

Adanya perkembangan pada dunia bisnis dan ekonomi juga akan mempengaruhi perkembangan standar akuntansi. Pola ini telah terjadi sejak beratus-ratus tahun lalu, bedanya hanya pada proses penetapan resmi yang ada sekarang baru dikembangkan sejak lima puluh tahun yang lalu. Prosedur akuntansi selama ini mengalami proses tanpa perdebatan maupun diskusi atau kompromi yang panjang. Adanya prosedur yang berbeda antar perusahaan dalam perlakuan akuntansi walaupun dengan kegiatan yang sama dikarenakan Para akuntan hanya mengembangkan metode untuk kebutuhan perusahaan mereka masing-masing. *Political Influence* Gipper, B., B. Lombardi, and D.J. Skinner (2013), mengartikan bahwa pengaruh politik atas penetapan standar sebagai intervensi yang disengaja dalam proses penetapan standar oleh entitas ekonomi dengan tujuan untuk memberikan pengaruh terhadap hasil dari proses agar terjadinya peningkatan kekayaan entitas atau untuk mencapai tujuan lain yang tidak sesuai kepentingannya sendiri.

Horngren (1973) dalam (Mardiyah, 2002:102), menyatakan bahwa penetapan standar akuntansi merupakan produk politik baik secara logika maupun secara empiris. Perusahaan yang memiliki insentif untuk *lobbying* atau kompromi terhadap penghapusan penggabungan untuk kombinasi bisnis dapat dihubungkan melalui kontribusi politik kepada anggota Kongres yang terlibat menentang proposal Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) tentang masalah ini. (Ramanna ,2008). Johnston dan Jones (2006), menyebutkan bahwa masalah akuntansi penting yang dipertimbangkan oleh FASB dari tahun 1999 hingga 2000 yaitu pengeluaran *lobbying* politik perusahaan terkait dengan minat mereka pada isu-isu tersebut. Kedua Pendapat dalam artikel sebelumnya menunjukkan bahwa adanya pengaruh politik terhadap standar akuntansi dari segi sektor swasta.

Agenda Standar-Setter

Penentu penting dari standar akuntansi adalah bagaimana isu-isu akuntansi tertentu dimasukkan dalam agenda standar setter ini, dan bagaimana proses agenda FASB ditetapkan. Beberapa penelitian empiris bahwa kekuatan ekonomi dan politik yang menentukan proyek mana yang FASB putuskan untuk diambil. Beresford, D. R. (1993) pada saat itu ketua FASB, mengatakan sebagai berikut: “Saya terus percaya bahwa pengaturan agenda adalah satu keputusan paling penting yang kami buat di FASB. Namun, untuk semua proses dalam pembentukannya, itu mungkin salah satu kegiatan yang paling tidak kita pahami Leftwich (1995) menunjukkan bahwa topik agenda potensial berasal dari setidaknya empat sumber: (i) Komite Penasihat Standar Akuntansi Keuangan (FASAC) melalui survei tahunan; (ii) *Emerging Issues Task Force* (EITF); (iii) pertemuan dewan dengan kelompok konstituen, termasuk SEC, dan (iv) korespondensi yang tidak diminta dari berbagai pihak.

Menurut Howieson (2009) Sumber proyek agenda banyak dan beragam yang sifatnya mekanisme formal maupun informal, termasuk pemantauan staf pers bisnis serta interaksi Dewan dengan para penyusun dan auditor. Bertomeu and Magee (2011) Menyatakan hubungan antara siklus ekonomi dan intervensi politik dalam penetapan standar fokus pada sektor keuangan. Maksudnya yaitu ketika kondisi ekonomi menurun, kekuatan politik akan memperlemah transparansi keuangan. Begitupun ketika ekonomi membaik maka transparansi keuangan pun akan membaik.

PEMBAHASAN

Proses Politik dalam Pembentukan Standar Akuntansi

May dan Sundem (1976) menyatakan bahwa dalam praktik maupun teori, laporan akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan pada kesejahteraan sosial.. Sehingga tidak heran jika FASB disebut sebagai sebuah badan politik. Hal ini dikarenakan proses seleksi alternatif akuntansi yang dilakukan didalamnya merupakan proses politik dimana harus mempertimbangkan aspek politik seperti kesejahteraan sosial, keputusan teori akuntansi dan riset akuntansi. *Financial Accounting Foundation* Menjelaskan penetapan standar akuntansi dapat digambarkan sebagai suatu Proses demokrasi yang berkaitan dengan kepentingan sosial dan semua pendapat harus didengar (penyusunan standar bersifat menyeluruh dan tidak hanya yang bersifat *specific group*) (Mardiyah, 2002).

Proses penyusunan standar sebagai proses politik karena aspek politik dalam akuntansi seperti halnya ada aspek politik secara fisik. Hal ini mmebutuhkan kehati-hatian terkait apakah politik berperan atau tidak dalam penetapan standar akuntansi. Oleh karena itu, di masa mendatang FASB harus memperhatikan isu ini demi menjaga kredibilitas akuntansi itu sendiri. Pertimbangan politik memberi pengaruh terhadap formulasi standar akuntansi dan keputusan ekonomi individu yang pada akhirnya memberikan juga dampak pada tujuan ekonomi secara makro.

Penelitian tentang *lobbying* selama proses penetapan standar

Konsekuensi ekonomi dari aturan akuntansi memunculkan sejumlah besar studi tentang *lobbying* atau bisa disebut kopromi selama proses penetapan standar. *Lobbying* yang dilakukan melalui *comment letter* oleh perusahaan dan manajer kepada penyusun

standar terhadap aturan akuntansi yang diusulkan seperti memorandum diskusi, draf paparan, atau dokumen "pandangan awal".

Comment letter Lobbying oleh perusahaan (preparers)

Watts dan Zimmerman (1986) berpendapat bahwa perusahaan besar cenderung melakukan *lobbying* aturan akuntansi yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan karena perusahaan yang terkena tekanan peraturan dan politik dan begitupun sebaliknya ada juga perusahaan melakukan hal untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Awalnya *Comment letters* digunakan untuk menguji ide-ide dalam menanggapi diskusi FASB Februari 1974 yang mengusulkan *General Price Level Accounting* (GPLA) dalam laporan keuangan (sebagai pengungkapan tambahan). Watts dan Zimmerman pertama melakukan Penggolongan tanggapan *comment letters* menjadi "ya" dan "tidak" dengan asumsi menggunakan atau menentang proposal ditambah dengan adanya perkiraan efek dari penggunaan GPLA pada pendapatan di laporan keuangan semua perusahaan pada saat itu. Ternyata ada 8 perusahaan memilih ya dan 18 memilih tidak dari total 26 perusahaan. 8 perusahaan berasal dari perusahaan yang lebih besar memilih ya dengan pertimbangan hipotesis biaya politik. Dari 8 perusahaan dengan kemungkinan peningkatan pendapatan atau tidak ada perubahan, 7 memilih tidak. Tanda efek dengan adanya tambahan pendapatan adalah positif dan sangat signifikan (menyiratkan bahwa perusahaan yang lebih besar pendapatannya akan menurun mendukung aturan yang diusulkan) hasil yang umumnya konsisten dengan prediksi mereka. Masalah umum dalam studi ini., karena hasil lain kurang kuat, dikarenakan ukuran sampel yang relatif kecil.

Kelly (1982) juga mempelajari *comment letters lobbying* oleh perusahaan dalam menanggapi rancangan eksposur 1974 FASB tentang GPLA. Dari 52 perusahaan, 14 di antaranya menentang posisi rancangan eksposur, untuk memeriksa apakah posisi *lobbying* terkait dengan rencana kompensasi manajemen, *leverage*, kepemilikan manajemen, dan ukuran. Namun, hasil yang lain tidak dapat ditemukan, hal ini disebabkan karena kekuasaan yang terbatas. Tahun 1985, dilanjutkan dengan meneliti karakteristik perusahaan yang memilih untuk *lobbying* pada rancangan eksposur ini dengan membandingkannya dengan perusahaan yang menentang sebelumnya. Namun, lagi-lagi terhambat oleh ukuran sampel yang kecil (ada paling banyak 38 perusahaan dalam berbagai subsamples yang melakukan *lobbying*).

Francis (1987) melihat *lobbying* pada dokumen proses hukum FASB yang menghasilkan SFAS87 yang dikeluarkan Desember 1985. The FASB awalnya mengeluarkan Memorandum Diskusi (1981) diikuti oleh Views Preliminary (1982) dan kemudian Memorandum Diskusi lain (1983). Dua dokumen terakhir menarik lebih dari 500 *comment letters*. Mereka diikuti oleh Exposure Draft pada tahun 1985 yang menghasilkan 400 *comment letters* lagi, masing-masing menghasilkan sejumlah besar *comment letters*, sebelum mengeluarkan standar akhir. Fakta-fakta ini saja tampaknya informatif tentang proses di mana standar ditetapkan. Studi Francis melihat *comment letters* yang diterima sebagai tanggapan terhadap dokumen Pandangan Pendahuluan. Dokumen tersebut menghasilkan lebih dari 500 *comment letters*, dimana 319 berasal dari perusahaan industri sebagian besar yang menentang aturan baru. Sampel terdiri dari 218 perusahaan dimana data Compustat dan pensiun tersedia. Penulis menggunakan sampel perbandingan dari 582 perusahaan non-*lobbying* yang Compustat dan data pensiun juga tersedia.

Hasil Analisis menyatakan bahwa keputusan perusahaan untuk melakukan *lobbying* sebagai fungsi ukuran perusahaan, serta neraca dan laporan laba rugi sebagai efek dari aturan. perusahaan yang besar lebih cenderung melakukan *lobbying* terhadap aturan yang diusulkan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan melakukan *lobbying* karena konsekuensi pelaporan keuangan.

Salah satu masalah yang pernah diatasi oleh FASB yaitu akuntansi minyak dan gas. standar diumumkan oleh FASB tetapi standar tersebut ditimpa oleh aturan SEC yang mengembalikan metode biaya penuh, salah satu contoh ketika SEC telah merebut kekuasaan FASB untuk menetapkan aturan akuntansi. Terlihat secara jelas bahwa adanya kepentingan politik yang besar, ini menjadialah satu contoh esensi politiki. Deakin (1989) menyatakan semua 137 perusahaan AS yang terdaftar yang menggunakan metode biaya penuh (FC); yaitu, dia punya set lengkap perusahaan yang akan terpengaruh oleh aturan baru. Faktor-faktor yang terkait dengan *lobbying* oleh perusahaan-perusahaan FC dengan data laporan keuangan yang tersedia pada: (a) memorandum diskusi FASB Desember 1975 (27 *lobbying* perusahaan; 67 tidak), (b) draft eksposur FASB bulan Juni 1977 (51 *lobbying* perusahaan; 67 tidak), dan (c) sebelum SEC pada Maret 1978 (50 *lobbying* perusahaan; 68 tidak), dan demikian mencakup bagian proses yang relatif lengkap.

Menurut pendapat penulis penyebab pendukung perusahaan yang memilih melakukan *lobbying* karena mempertimbangkan rencana kompensasi manajemen, insentif kontrak utang, serta oleh tingkat kegiatan eksplorasi minyak dan gas perusahaan. Selain itu karena minyak dan gas jelas merupakan masalah ekonomi dan politik yang penting pada saat itu, dan (b) ketersediaan aset lengkap perusahaan-perusahaan FC dan keputusan untuk memeriksa partisipasi mereka dalam beberapa tahap proses *lobbying*. Untuk melihat apakah perusahaan audit mendapat manfaat dari standar yang memberlakukan persyaratan baru maka dapat menggunakan aturan akuntansi dengan membuat dua kelompok. Kelompok pertama yang membutuhkan auditor dan klien mereka untuk membuat pengungkapan baru (seperti angka laporan keuangan yang disesuaikan dengan inflasi) dan kelompok yang kedua yang membatasi pilihan akuntansi dengan menghilangkan beberapa metode akuntansi yang diminati oleh klien. Teknik *lobbying* pada enam draft paparan, yang dipilih untuk mewakili kedua jenis standar tentang akuntansi tingkat harga umum, sewa, surat berharga, pelaporan segmen dan akuntansi minyak dan gas serta valuta asing. Kemudian data *comment letters* untuk 41 perusahaan audit yang melakukan *lobbying* merupakan salah satu dari draft paparan, dan sekitar 2.100 perusahaan klien perusahaan di mana dapat menemukan informasi laporan keuangan termasuk efek dari penggunaan standar dari setiap perusahaan. Dari yang awalnya menganggap kalau *comment letters* sebagai alat untuk setuju atau tidak setuju dalam penggunaan *draft* eksposur tertentu, namun ternyata posisi *comment letters* sering lebih rumit.

Lobbying oleh pihak lain, termasuk kantor audit

Watts dan Zimmerman (1982) di mana mereka menunjukkan bahwa perusahaan audit melobi langsung untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan klien mereka. Allen, Ramanna, Rowchowdhury (2012). "pengetatan" oligopoli Big 4 yang mempengaruhi cara perusahaan dalam melobi proses penetapan standar dengan alasan meningkatkan biaya litigasi dan biaya politik selama periode di mana pengetatan yang terjadi membuat perusahaan-perusahaan ini lebih cenderung melobi peraturan yang

meningkatkan keandalan pelaporan keuangan Seperti yang dibahas dalam konteks Allen dan Ramanna (2013) di bawah ini, masalah lain cenderung lebih menonjol dalam konteks setiap diberikan topik akuntansi. Para penulis menafsirkan hasil mereka sebagai menyiratkan bahwa peningkatan visibilitas perusahaan dari waktu ke waktu, dikombinasikan dengan kurang perhatian tentang preferensi klien mereka untuk kebijaksanaan keuangan, telah menyebabkan kantor audit untuk melobi lebih kuat terhadap standar yang mereka anggap akan menghasilkan keandalan yang lebih rendah.

KESIMPULAN

Teori ekonomi politik dalam pengaturan standar akuntansi atau kekuatan politik dalam beberapa kasus secara langsung mempengaruhi agenda penetapan standar yang dilakukan oleh FASB. karena keputusan agenda menentukan topik mana yang dipertimbangkan dan mana yang tidak, sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan paling penting dibuat oleh penentu standar dan menentukan aturan akuntansi yang mulai berlaku. *Comment letters* yang disampaikan oleh para penyusun (perusahaan dan manajer). perusahaan besar lebih mungkin untuk mengirimkan *comment letters* dan kegiatan *lobbying* perusahaan bergantung pada efek yang akan diraskan dari aturan yang diusulkan pada laporan keuangan mereka.

Kami berharap tulisan ini dapat mengingatkan para pembaca dan para pemangku kepentingan akan pentingnya pengaturan standar hal ini dikarenakan kebijakan akuntansi telah menjadi fokus dalam upaya meningkatkan perhatian politik dan peraturan di bangun dari krisis keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka Widiastuti, N. P. (2012). Implementasi Teori Akuntansi Dalam Perumusan Standar Akuntansi Pelaporan Keuangan. *Bina Widya*, 23(3), 154–160.
- Gamayuni, R. R. (2009). Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju International Financial Reporting Standards. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mardiyah, A. A. (2002). Dampak Proses Politik dan Konsekuensi Ekonomi dalam Pembentukan Suatu Standar. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 3(2), 96–123. Retrieved from <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/809/933>
- Prasetya, D. F. (2012). Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(4), 113–117. Retrieved from <http://journal.wima.ac.id/index.php/JIMA/article/view/257>
- Purba, A. S., Rahmania, E., & Utami, D. (2018). Dampak proses politik terhadap pembentukan standar akuntansi studi literatur fokus kepada fasb. *Akuntabel*, 15(2), 73–83. Retrieved from <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>
- Salmiah, N., Indarti, & Siregar, I. F. (2015). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DAN KESESUAIANNYA DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (Pada UMKM di Kecamatan Sukajadi Binaan DisKop & UMKM Kota Pekanbaru). *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 212–226.
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 285. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>

